



Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan

Teguh Dartanto, SE
Bambang P.S. Brodjonegoro, PhD

Keywords: Fiscal Decentralization, Economics Growth, Regional Disparity.

ABSTRACT

From January 1, 2001, when new autonomy laws were implemented, Indonesia began to move toward decentralization of what had been a highly centralized. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which basically the devolution policy, has been accompanied by La No.25/1999, which basically reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of " money follows function".

Law No.25/1999 describe the fiscal decentralization process that will create a new intergovernmental transfer scheme between the central government and local government. Some of items in the law were really new ones such as the natural resources revenue sharing, income tax sharing, general allocation fund (GAF) and specifics allocation fund (SAF). The policies of tax and natural resource revenue sharing can result in fiscal imbalance among regions. Tax and natural resources revenue sharing will benefit only to urbanized and natural resources rich regions. Because of it, Central Government created General Allocation Funds. This fund has block grant characteristic and will be given to regions by fiscal gap conception. The purpose is to equalize fiscal capacity among regions that in turn also can reduce disparity among them.

The Simultaneous Macro Econometric Model is made for analyzing the fiscal decentralization impact to economic growth and region disparity. The policy simulation in this model used transfer fund from central government such as Tax Revenue Sharing, Natural Resource Revenue Sharing and General Allocation Fund. The simulation is carried out to see the optimality of various possible existing policies. The optimality is measured by evaluating the high rate of economic growth and low disparity.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia memasuki era otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada UU nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan UU nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelbagai bidang. UU No. 22/1999 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara UU No. 25/1999 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. UU No. 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.¹

Diterapkannya UU No. 25/1999 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Banyak hal-hal baru yang diatur dalam UU No.25/1999 yaitu mengenai Dana Perimbangan sebagai penerimaan daerah yang merupakan transfer dari pusat ke daerah. Dana Perimbangan ini meliputi : *Pertama*, Dana Bagi Hasil Pajak (*Tax Revenue Sharing*) yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan (PPH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) (*Natural Resources Revenue Sharing*). *Ketiga*, Dana Alokasi Umum (DAU). *Keempat*, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, hasil tambang, hasil hutan, dan hasil perikanan merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan Dana Alokasi Umum merupakan bentuk lain dari SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Dana INPRES pada jaman sebelum otonomi daerah. Melalui kebijakan bagi hasil SDA diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat lebih merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki. Karena selama ini hasil SDA lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat. Bagi hasil Sumber Daya Alam ditujukan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah pemilik, sedangkan DAU untuk mengurangi ketimpangan horisontal (*horizontal imbalance*) antara daerah.

Distribusi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, bahan tambang tidak merata diseluruh daerah di Indonesia sehingga ada daerah yang memperoleh dana perimbangan SDA yang besar seperti Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Irian Jaya dan ada daerah yang kecil sekali bagi hasil SDA-nya. Selain itu daerah-daerah seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya akan memperoleh dana bagi hasil pajak (PBB BPHTB dan PPh) yang cukup besar, karena kegiatan ekonomi terpusat di daerah metropolitan. Kondisi seperti ini membawa implikasi meningkatnya kesenjangan fiskal antar daerah, pada akhirnya melalui kebijakan ekonomi (ekspansi pengeluaran pemerintah) dapat meningkatkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Perbedaan kemampuan fiskal antar daerah akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Pemerintah daerah yang memiliki dana cukup besar dapat melakukan ekspansi pengeluaran. Dengan dana tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan

¹ B. Raksaka Mahi, "Fiscal Decentralization : Its Impact on Cities Growth". Jakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Vol.2, No.1 , Juli 2001. hal.1.

sarana dan prasarana, melakukan investasi, menyediakan dan meningkatkan kualitas barang publik. Ekspansi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi lainnya seperti tingkat konsumsi & investasi. Pembangunan sarana dan prasarana yang cukup baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut sehingga kegiatan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang cukup akan semakin maju perekonomiannya sedangkan daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal akan semakin jauh tertinggal.

Menyadari kemungkinan akan meningkatkan *inequality* antar daerah baik itu pertumbuhan ekonominya maupun pendapatan perkapitanya sebagai akibat dari bagi hasil SDA dan Pajak, maka berdasarkan UU No. 25/1999, pemerintah memberikan bantuan berupa DAU yang bersifat blok (*Block Grant*) yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang penggunaannya ditentukan oleh tiap-tiap daerah sendiri. Besarnya DAU masing-masing daerah ditentukan dengan menggunakan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Berdasarkan konsep *fiscal gap* daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar akan memperoleh DAU yang lebih kecil dan daerah yang kapasitas atau kemampuan fiskalnya rendah akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini daerah-daerah kaya SDA dan daerah yang pajaknya besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil. Dengan demikian dapat terlihat bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal tiap daerah (*equalizing transfer*). Dengan bantuan ini diharapkan dapat memperbaiki kesenjangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan antar daerah.

Tujuan Penulisan

Seperti yang telah diungkapkan pada bagian latar belakang permasalahan, tujuan skripsi ini adalah:

- Mengetahui keterkaitan antara kebijakan keuangan daerah dengan kondisi makroekonomi daerah.
- Melihat dampak dana transfer (dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA & DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah.
- Melihat efektifitas DAU dalam mengurangi disparitas antar daerah.

LANDASAN TEORI

Tinjauan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Pada UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dijelaskan tentang struktur keuangan daerah yang baru. Pada UU ini menyebutkan pada pasal 3 bahwa sumber-sumber penerimaan daerah (TR) dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi : *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*; *Dana Perimbangan (DP)*; *Pinjaman Daerah (LOAN)*; *Lain-lain Penerimaan yang sah (OTH.REV)*.

$$TR = PAD + DP + LOAN + OTH.REV$$

Karena ada kekhawatiran dari pemerintah pusat maka ada larangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah.

Berdasarkan pasal 4 dijelaskan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari : *hasil pajak Daerah (TAX)*; *hasil retribusi Daerah (R)*; *hasil perusahaan milik Daerah dan hasil*

pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan (PROFT); lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (OTHS). $PAD = TAX + R + PROFT + OTHS$. Sedangkan ketentuan mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Pada pasal 2 UU No.34 tahun 2000 disebutkan tentang jenis-jenis pajak ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten. Pajak tingkat propinsi meliputi : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak tingkat kabupaten meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak pengambilan bahan galian golongan C. sedangkan pada pasal 18 dijelaskan tentang objek retribusi yang meliputi: jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.

Salah satu hal yang baru dalam keuangan daerah yaitu adanya dana perimbangan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dana perimbangan seperti disebutkan pada pasal 6 UU No.25 tahun 1999 terdiri dari : *Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan perbandingan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagi hasil Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (PBB BPHTB) dibagi dengan perbandingan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Selain bagi hasil pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB BPHTB) pemerintah pusat juga memberikan bagi hasil pajak penghasilan (PPH) kepada daerah yang besarnya 20% untuk daerah dan 80% untuk pusat.

Dana perimbangan yang selanjutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut pasal 7 UU No.25 tahun 1999 dinyatakan bahwa : (1) *Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.* (2) *Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1).* Formula yang digunakan dalam pembagian DAU yaitu menggunakan dua kriteria yaitu kemampuan fiskal (*fiscal Capacity*) dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah (*fiscal need*).

Fiscal needs suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: jumlah penduduk, total area, kondisi geografis dan jumlah penduduk miskin. Jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar, area yang luas, kondisi geografis yang sulit serta banyak penduduk miskin maka akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang besar. Jumlah penduduk dan luas wilayah dapat diketahui secara pasti, sedangkan untuk kondisi geografis didekati dengan indek konstruksi dan jumlah penduduk miskin didekati menggunakan konsep kemiskinan dengan ukuran *poverty line*.

Fiscal capacity relatif lebih mudah diukur, kemampuan fiskal ini diukur berdasarkan: PDRB, potensi industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), potensi sumber daya alam (diukur dengan PDRB sektor primer) dan potensi sumber daya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB yang tinggi, aktivitas industri dan

jasa yang besar, kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil².

Tujuan pengalokasian DAU ini selain dalam kerangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki tujuan lain. Salah satu tujuan penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun kerap dinyatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, namun distribusi sumber daya alam itu sendiri di antara propinsi-propinsi, dan juga di antara kabupaten dan kota, di Indonesia tidaklah merata. Oleh karena itu, sumber perimbangan dana keuangan pusat-daerah yang berasal dari sumber daya alam juga akan menghasilkan perimbangan yang tidak merata. Dalam konteks ini, DAU dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang dihasilkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komponen transfer dari pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini seperti tercantum pada pasal 8 UU No.25/1999 yaitu *1. kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, 2. kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional*. Dana Reboisasi merupakan salah satu komponen dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembagian dari Dana Reboisasi 40% diberikan kepada daerah penghasil sebagai DAK dan 60% untuk pemerintah pusat.

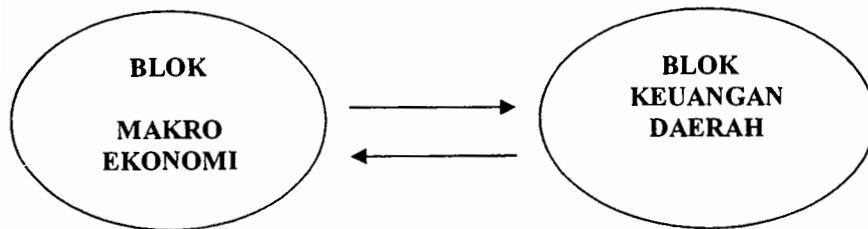
METODE PENELITIAN

Rancangan Model Makro Simultan

Pada dasarnya model yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada model-model yang telah ada dengan pelbagai tambahan dari sumber-sumber lainnya. Model yang sejenis telah digunakan oleh LPEM FE-UI dalam penelitian tentang Dampak Penerimaan Dana Perimbangan Dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Perekonomian Daerah, makalah *The Impacts of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies : A Simultaneous Econometric Approach* (Bambang P.S Brodjonegoro,2001).

Model makro simultan antar daerah ini terdiri dari 2 (dua blok) yaitu blok makroekonomi perdagangan, dan blok keuangan daerah. Pada blok makroekonomi terdapat dua bagian yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran mencerminkan keluaran (*output*) suatu daerah. Permintaan menunjukkan permintaan agregat yang tercermin dalam penggunaan (*expenditure*) barang dan jasa seluruh masyarakat. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada sisi keuangan daerah memperlihatkan bagaimana peranan sektor pemerintah daerah dalam mempengaruhi perekonomian daerahnya. Lebih jauh, hubungan antar blok model makro ekonomi simultan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

² Brodjonegoro, Bambang P.S. "The Impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Economies: A Simultaneous Econometric Approach." Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium 2001: Regional Economies in Transitions, June 14-16,2001. Hal.5.



Secara rinci, model makro simultan terdapat di bawah ini:

♦ BLOK MAKROEKONOMI

1. Output

$$PDRB = f(K, L)$$

$$K = K_{-1} * 0.94 + I$$

$$L = f(POP)$$

$$AD = Cons + I + G$$

$$GAP = PDRB - AD$$

$$PDRBCAP = PDRB / POP$$

Output (PDRB) suatu daerah dipengaruhi oleh kapital (K) dan jumlah tenaga kerja (L). Kapital (K) diasumsikan sebagai penjumlahan depresiasi 6% dari kapital sebelumnya ditambah dengan investasi (I) pada saat itu. Jumlah tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP). Permintaan agregat (*aggregate demand*) merupakan penjumlahan dari konsumsi (C), Investasi (I), pengeluaran pemerintah (G). GAP merupakan selisih antara PDRB dengan permintaan agregat suatu daerah. Pendapatan perkapita merupakan pembagian antara PDRB dan populasi.

2. Konsumsi

$$CONS = f(PDRBCAP, POP, CONS_{-1})$$

Dalam model ini, konsumsi masyarakat (C) merupakan fungsi dari pendapatan perkapita (PDRBCAP), jumlah penduduk (POP) dan konsumsi pada tahun sebelumnya (C₋₁). Dimasukkannya jumlah penduduk merupakan akibat langsung adanya mobilitas penduduk antar daerah.³ Semua variabel mempengaruhi secara positif terhadap konsumsi.

3. Pengeluaran Pemerintah

$$G = f(RE)$$

Persamaan diatas bertujuan melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan pengeluaran pemerintah versi PDRB dan APBD⁴.

³ Iwan Jaya Azis, "Interregional Allocation of Resources In Indonesia: Is There Any Systematic Planning?" Jakarta: Inter-University Center for Economics, FE-UI, 1990, hal. 18.

⁴ Dalam data PDRB menurut pengeluaran, terdapat variabel pengeluaran pemerintah. Bila angka tersebut dihitung dan dibandingkan dengan angka pengeluaran pemerintah dalam APBD, selalu terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Beberapa informasi yang diperoleh dari BPS menyatakan bahwa data pengeluaran pemerintah dalam PDRB pengeluaran tersebut

4. Investasi

$$I=f(PDRBCAP, Ir_1, DE, I_1)$$

Investasi disuatu daerah merupakan penjumlahan antara investasi pihak swasta dan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta sangat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita (PDRBCAP) dan suku bunga riil tahun sebelumnya (Ir_1). PDRBCAP berpengaruh secara positif dan suku bunga riil tahun sebelumnya berpengaruh secara negatif. Sedangkan investasi pemerintah daerah sangat tergantung pada tingkat pengeluaran pembangunan (DE). Investasi suatu daerah juga dipengaruhi secara positif oleh investasi tahun sebelumnya (DE_1).

◆ BLOK KEUANGAN DAERAH

5. Pajak Daerah

$$TAX = f(CONS, TAX_1)$$

Penerimaan pajak suatu daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat konsumsi (CONS) dan pajak tahun sebelumnya (TAX_1). Penerimaan pajak tahun sebelumnya mempengaruhi target pajak pada tahun berikutnya.

6. Retribusi

$$R=f(PDRB, POP, R_1)$$

Retribusi daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP), pendapatan regional bruto (PDRB) dan retribusi tahun sebelumnya (R_1). Secara teoritis retribusi merupakan pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga jumlah penduduk dan pendapatan menjadi faktor penting dalam jumlah retribusi yang dapat dikumpulkan. POP, PDRB dan R_1 berpengaruh positif terhadap retribusi suatu daerah.

7. Laba Perusahaan Daerah

$$PROFT=f(CONS, PROFT_1)$$

Laba perusahaan daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat konsumsi suatu daerah (CONS) dan keuntungan tahun sebelumnya ($PROFT_1$). Karakteristik perusahaan daerah kebanyakan bergerak di sektor air minum, pasar sehingga konsumsi memiliki pengaruh positif.

8. Penerimaan Daerah Lainnya

$$OTHS=f(POP, PAD, TEXP)$$

adalah merupakan data pengeluaran rutin yang terdapat dalam APBD. Tetapi tetap saja bila dibandingkan, tidak terdapat kesesuaian. Oleh karenanya, persamaan (3) merupakan "jembatan" bagi kedua data ini. Dalam studi Ari Kuncoro, ditunjukkan bahwa persamaan semacam ini membantu dalam menyelesaikan persoalan ekonometri untuk model makroekonomi.

Penerimaan daerah lainnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP), jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah total pengeluaran (TEXP). POP, PAD, TEXP berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah lainnya.

9. Pengeluaran Pembangunan

$$DE=f(TR, DE_{-1})$$

Pengeluaran pembangunan dipengaruhi secara positif oleh jumlah total penerimaan daerah (TR) dan pengeluaran pembangunan tahun sebelumnya. Jika pemerintah memiliki penerimaan yang besar akan cenderung meningkatkan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan tahun sebelumnya dijadikan acuan penentuan pengeluaran pembangunan tahun berikutnya.

10. Pengeluaran Rutin

$$RE=f(POP, RE_{-1})$$

Pengeluaran rutin suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pengeluaran rutin tahun sebelumnya. POP dan RE₋₁ berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka pengeluaran rutusnya akan semakin besar karena terkait dengan pelayanan publik.

11. Pendapatan Asli Daerah

$$PAD=TAX+R+PROFT+OTHS$$

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak (TAX), retribusi daerah (R), keuntungan perusahaan daerah (PROFT), dan penerimaan lain yang sah (OTHS).

12. Total Penerimaan Daerah

$$TR=PAD+PBB\ BPHTB+BHSDA+PPH+DAU$$

Total penerimaan daerah berdasarkan UU No. 25/1999 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

13. Total Pengeluaran Daerah

$$TEXP=DE+RE$$

Total pengeluaran suatu daerah adalah penjumlahan antara pengeluaran rutin (RE) dan pengeluaran pembangunan (DE).

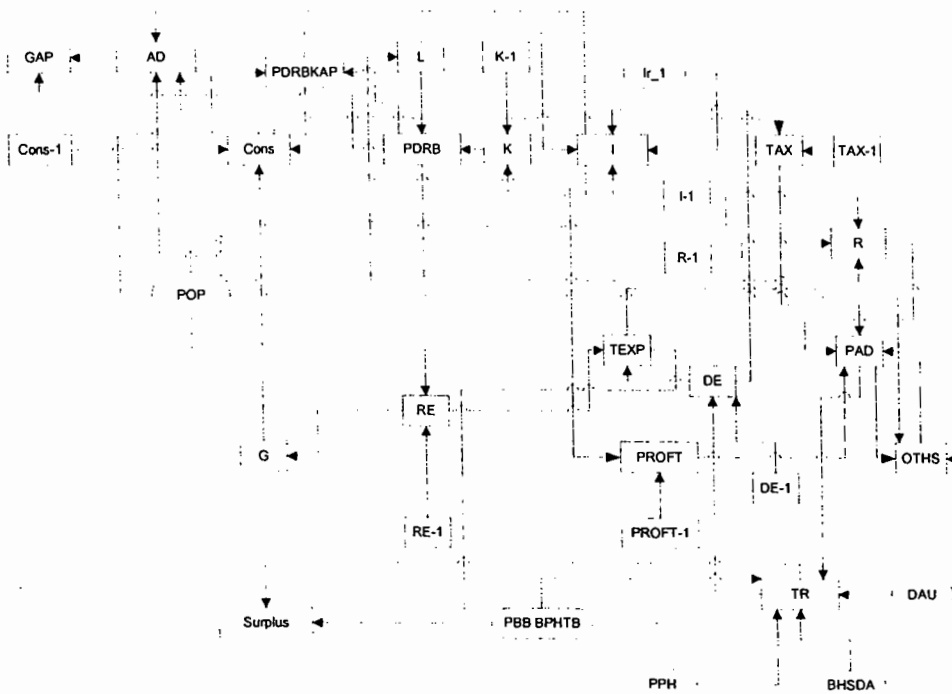
14. Surplus

$$SURPLUS=TR-TEXP$$

Surplus merupakan selisih antara total penerimaan (TR) dengan total pengeluaran (TEXP).

Di bawah ini merupakan ringkasan model makro simultan yang digunakan dalam skripsi ini:

Flowcart Model Makro Ekonometrik Simultan



= Variabel Endogen



= Variabel Eksogen

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atas dasar harga konstan 1993. Data yang digunakan merupakan data pada level kabupaten dan propinsi diseluruh Indonesia. Data yang digunakan merupakan data-data terbitan BPS, Statistik Keuangan Indonesia terbitan BI, data-data terbitan Departemen Keuangan RI, data Susenas.

ESTIMASI, EVALUASI DAN SIMULASI

Estimasi Model Makro Ekonometrik Simultan

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Model Makro Ekonometrik Simultan

	DEPENDENT VARIABLE											
	PDRB	L	CONS	I	G	TAX	R	PROFT	OTHS	DE	RE	
C	107.72 1.9915				40.612 7.933							
K	0.3543 59.386											
L	2.097 37.678											
POP		0.3722 232.54	0.101 8.945				0.00088 6.1455		0.0002 9.9081		0.00427 6.3849	
PDRBcap			29.206 3.517	29.864 4.043								
PDRB							0.00047 5.0605					
CON ₁						0.0055 9.834		0.0003 16.732				
CONS ₁			0.5939 34.801									
I ₁				0.5151 29.08								
IR ₁				-5.441 -3.941								
TAX ₁						0.5452 31.222						
R ₁							0.3541 13.417					
PROFT ₁								0.3742 20.278				
PAD									0.0226 22.762			
TEXP									0.0058 11.566			
TR										0.3018 54.535		
DE				0.5902 7.63*								
RE					1.7697 51.545							
RE ₁											0.7929 53.47	
DE ₁										0.0877 7.2339		
EVALUASI	F	8267.64	48243	4440.7	782	2651.3	3897.5	1468.95	2788.9	6423.4	15668	22772
	Adj R ²	0.9458	0.9807	0.9036	0.7099	0.7439	0.8066	0.756	0.7528	0.9329	0.9435	0.96
	DW	1.9627	1.8742	1.413	2.0843	2.033	1.585	1.3662	1.9032	1.9798	1.5935	1.6874
	Theil	0.1125	0.0659	0.1538	0.2848	0.2559	0.2562	0.2629	0.3369	0.1861	0.0948	0.1487

* Variabel ini signifikan pada level 10%.

Model Makro Ekonometrik simultan yang digunakan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah ini, diestimasi dengan menggunakan metode *Two Stage Least Square (TSLS)* karena persamaan dalam model adalah *overidentified* (kelebihan informasi). Tetapi karena karakteristik data yang digunakan *cross sections* ada indikasi *heterocedasticitas*, agar diperoleh varian yang konstan dan menghasilkan koefisien yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) metode yang digunakan adalah *Weighted Two Stage Least Square*. Hasil Estimasi dari Model Makro Ekonometrik Simultan adalah sebagai berikut:

Evaluasi dan Validasi Model

Secara umum hasil estimasi parameter model makro ekonometrik simultan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan disparitas masuk akal secara ekonomi dan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari tanda koefisien yang arah dan besarannya bersesuaian dengan teori ekonomi dan keuangan daerah. Jika dilihat dari kriteria statistik melalui uji t dan F, seluruh persamaan sebagian besar signifikan secara statistik pada taraf nyata pengujian 5% sedangkan ada 1 variabel signifikan pada level 10%. Nilai koefisien determinasi (R^2) nilainya cukup tinggi diatas 80%, kecuali 4 persamaan yaitu persamaan pengeluaran pemerintah (G), investasi (I), penerimaan pajak daerah (TAX) dan keuntungan perusahaan daerah (PROFT). Hal ini menunjukkan seluruh persamaan baik yang berhubungan dengan makro ekonomi dan keuangan daerah cukup mampu menjelaskan perilaku seluruh variabel endogen.

Jika dilihat dari kriteria ekonometrik seluruh persamaan tidak mengandung autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Durbin Watson (DW)* yang mendekati 2, kecuali persamaan investasi (1.413), pajak daerah (1.585), retribusi (1.366) dan pengeluaran pembangunan (1.5935). Masalah heteroskedastisitas sudah ditangani dengan menggunakan metode *Weighted Two Stage Least Square*.

Secara umum model dapat dianggap cukup valid untuk digunakan dalam proyeksi dan simulasi ke depan. Jika melihat nilai *Theil's Inequality Coefficient* dari setiap persamaan tingkah laku, model yang dibuat memang belum menunjukkan nilai *Theil's* yang terbaik atau mendekati nol. Sebagian besar Nilai *Theil's* yang didapatkan terletak antara 0 sampai dengan 0.2. Terdapat 2 persamaan yang nilai *Theil's*nya kurang dari 0.1 yaitu persamaan tenaga kerja (L) dan persamaan pengeluaran pembangunan (DE). Ada 4 persamaan yang nilai *Theil's* nya terletak antara 0.2 - 0.3 yaitu persamaan investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), penerimaan pajak (TAX) dan retribusi (R), sedangkan satu persamaan nilai *Theil's* lebih dari 0.3 yaitu persamaan keuntungan perusahaan daerah (PROFT). Walaupun begitu model ini sudah cukup valid untuk digunakan dalam peramalan karena hasil simulasi yang dilakukan tidak menunjukkan *overestimate* atau *underestimate*. Di bawah ini merupakan tabel yang *Theil's* dari setiap persamaan.

Tabel 4.2 *Theil's Inequality Coefficient*

	PDRB	L	CONS	I	G	TAX	R	PROFT	OTHS	DE	RE
Theil's	0.113	0.066	0.154	0.285	0.256	0.256	0.263	0.337	0.186	0.095	0.149

Sumber: Hasil perhitungan output komputer.

Simulasi Model

Melihat dari kondisi, evaluasi dan validasi model makro ekonometrik simultan, maka model ini dapat diandalkan untuk meramalkan kondisi pertumbuhan perekonomian daerah dan disparitas antar daerah sebagai akibat kebijakan desentralisasi fiskal yang dilakukan di Indonesia saat ini. Dalam studi ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan variabel eksogen (variabel kebijakan) yang berupa dana tranfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Dana transfer tersebut adalah PBB BPHTB, PPh, BHSDA, DAU. Dalam simulasi akan diuji pelbagai kombinasi kebijakan yang akan memberikan hasil yang optimal. Ukuran optimalitas kebijakan dapat ditinjau dari pelbagai segi antara lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan disparitas antar daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan PDRB per-kepita sebelum dan sesudah desentralisasi. Nilai pertumbuhan ekonomi yang didapatkan menunjukkan tambahan pertumbuhan ekonomi dengan adanya desentralisasi fiskal. Misalkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperoleh angka 0.5% artinya dengan adanya desentralisasi fiskal mampu memberikan tambahan pertumbuhan sebesar 0.5% dibandingkan sebelum desentralisasi. Disparitas antar daerah diukur dengan menggunakan koefisien variasi. Selain itu simulasi ini juga digunakan untuk mengukur apakah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan saat ini apakah efektif dan efisien.

Simulasi Kebijakan

Pada simulasi ini akan dilakukan simulasi dengan melakukan kombinasi pelbagai kebijakan, agar dapat terlihat kebijakan yang memberikan hasil paling optimal. Kombinasi kebijakan itu antara lain:

1. *Simulasi 1* : simulasi historis sebelum adanya desentralisasi fiskal. Variabel yang digunakan untuk simulasi ini adalah gabungan SDOINPRESS, BHP, BHBP.
2. *Simulasi 2* : PBB BPHTB, simulasi ini dilakukan untuk melihat dampak murni PBB BPHTB terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah.
3. *Simulasi 3* : PPh, simulasi ini dilakukan untuk melihat dampak murni bagi hasil pajak penghasilan.
4. *Simulasi 4* : BHSDA, simulasi ini dilakukan untuk melihat dampak murni dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah.
5. *Simulasi 5* : DAU2002, simulasi ini digunakan untuk melihat dampak murni dari DAU terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemampuannya untuk mengurangi disparitas antar daerah. Data DAU 2002 yang dipakai adalah data berdasarkan Keppres No.131/2001 tentang DAU. Data ini tidak termasuk dana penyeimbang.
6. *Simulasi 6* : kombinasi antara PBB BPHTB & PPh. Simulasi ini digunakan untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas. Kebijakan ini dirasakan akan menguntungkan daerah metropolitan (kota besar) dan daerah industri.
7. *Simulasi 7* : kombinasi antara PPh dan BHSDA. Simulasi ini untuk melihat dampak kombinasi dari kedua kebijakan. Diharapkan kombinasi kedua kebijakan ini akan mengakibatkan disparitas antar daerah dan akan menguntungkan daerah tertentu.
8. *Simulasi 8* : kombinasi antara PPh dan DAU2002. Dari kombinasi ini diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan penurunan disparitas antar daerah.
9. *Simulasi 9* : kombinasi antara BHSDA dan DAU2002. Kedua kebijakan ini diharapkan memiliki dampak seperti pada simulasi 8.
10. *Simulasi 10* : kombinasi antara PBB BPHTB & PPh & BHSDA. Kombinasi ini untuk melihat dampak total dana bagi hasil.
11. *Simulasi 11* : kombinasi dari seluruh kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (PBB BPHTB & PPh & BHSDA & DAU2002). Dari simulasi yang terakhir ini akan

terlihat dampak desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antara daerah.

Analisa Hasil Simulasi Kebijakan Secara Nasional Disparitas Antar Daerah

Indikator yang digunakan untuk melihat disparitas pendapatan antara daerah adalah dengan melihat koefisien variasi (Coefficient of Variance) PDRB per-Kapita (Rp. juta/Orang) antar daerah untuk masing-masing kondisi simulasi. Pada kondisi sebelum adanya desentralisasi fiskal sudah terjadi disparitas pendapatan yang sangat besar antara Jawa dan Luar Jawa, antara wilayah barat dan timur. Masalah ini merupakan masalah yang kronis yang tidak mudah diselesaikan dan memicu adanya disintegrasi bangsa. Disparitas antar daerah ditunjukkan oleh koefisien variasi dari simulasi historis yaitu 59.790%.

Kebijakan dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil yaitu (PBB BPHTB, PPh, BHSDA) memperburuk disparitas antar daerah. Hal ini ditunjukkan meningkatnya koefisien variasi dari 59.790% menjadi 60.038% untuk BHSDA, 59.907% untuk PPh dan 59.900% untuk PBB BPHTB. BHSDA memiliki pengaruh paling besar terhadap disparitas antar daerah dibandingkan dengan bagi hasil PPh dan PBB BPHTB. Hal ini dikarenakan oleh persebaran SDA yang tidak merata, ada 3 propinsi yaitu Aceh, Riau dan Kaltim memperoleh BHSDA sebesar masing-masing 3.070%, 5.560% dan 5.193% dari total PDRB. Sedangkan daerah seperti Sumsel memperoleh 1.331%, Kalteng (1.261%) dan Maluku Utara memperoleh 1.212%. Daerah yang lain umumnya memperoleh bagian kurang dari 1% dari total PDRBnya. Daerah yang paling kecil menerima BHSDA adalah Banten yaitu 0.008%.

Tabel 3 Ringkasan Hasil Simulasi PDRB per-Kapita se-Indonesia

No.	Simulasi	Rata-Rata (Juta/Orang)	Standar Deviasi	Koefisien Variasi	PDRBCap Tertinggi	Daerah Tertinggi	PDRBCap Terendah	Daerah Terend.
1	SDO, INPRES (Histori)	1.813	1.084	59.79	5.372	DKI	1.029	Maluku
2	PBB BPHTB	1.81	1.084	59.9	5.371	DKI	1.025	Maluku
3	PPh	1.809	1.084	59.907	5.372	DKI	1.025	Maluku
4	BHSDA	1.811	1.087	60.038	5.369	DKI	1.025	Maluku
5	DAU2002	1.818	1.084	59.626	5.37	DKI	1.033	Maluku
6	PBB BPHTB & PPh	1.81	1.084	59.914	5.373	DKI	1.025	Maluku
7	PPh & BHSDA	1.811	1.088	60.052	5.372	DKI	1.025	Maluku
8	PPh & DAU2002	1.818	1.084	59.641	5.373	DKI	1.033	Maluku
9	BHSDA & DAU2002	1.82	1.088	59.771	5.37	DKI	1.033	Maluku
10	PBB BPHTB & PPh & BHSDA	1.812	1.088	60.059	5.374	DKI	1.025	Maluku
11	PBB BPHTB & PPh & BHSDA & DAU2002	1.821	1.089	59.793	5.375	DKI	1.034	Maluku

Sumber: Hasil simulasi

Bagi Hasil PPh menempati urutan kedua sebagai salah satu penyebab disparitas antar daerah. Distribusi PPh tidak merata di seluruh Indonesia hanya daerah yang besar tingkat industri dan kegiatan jasanya yang memperoleh bagian yang besar, seperti Jakarta yang

industri dan kegiatan jasanya yang memperoleh bagian yang besar, seperti Jakarta yang memperoleh dana bagi hasil lebih dari 1 triliun rupiah (secara nominal) atau sekitar 0.699% dari total PDRB. Daerah lainnya memperoleh dana yang kurang dari 0.5% dari total PDRBnya. Daerah yang tinggi tingkat industri dan kegiatan jasanya cenderung memiliki Bagi Hasil Pajak Penghasilan yang besar. Daerah seperti Riau, DKI, Kaltim, Irija memperoleh bagi hasil pajak penghasilan relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Bagi Hasil dari PBB BPHTB menempati urutan terakhir penyebab disparitas karena nilai bagi hasil setiap daerah relatif lebih merata. Transfer DAU mampu mengurangi disparitas antar daerah ditunjukkan nilai koefisien variasi berada dibawah nilai pada simulasi historis yaitu 59.626%. Selain DAU berfungsi sebagai *fiscal equalizing transfer* juga berperan sebagai *income equalization*. Jika DAU hanya sebagai satu-satunya transfer maka jelas terlihat DAU mampu mengurangi disparitas antar daerah walaupun penurunan nilai koefisien variasinya tidak begitu signifikan.

Jika dilakukan kombinasi 2 kebijakan, maka kombinasi PPh & BHSDA memiliki nilai koefisien variasi paling besar dibandingkan dengan kombinasi lain yaitu 60.052%, kedua kombinasi ini semakin meningkatkan disparitas dibandingkan dengan transfer BHSDA maupun PPh. Hal ini disebabkan persebaran dari SDA tidak merata di seluruh wilayah Indonesia dan hanya daerah-daerah tertentu yang memperoleh bagi hasil PPh yang cukup signifikan. Daerah seperti Kaltim, Riau selain memperoleh BHSDA yang besar juga memperoleh bagi hasil PPh yang besar. Hal ini dikarenakan Kaltim dan Riau merupakan kawasan industri dan jasa di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kondisi inilah yang menyebabkan kedua transfer di atas mendorong meningkatnya disparitas antar daerah. Variasi Kombinasi PPh & BPHTB sebesar 59.914%. Kombinasi DAU2002 & PPh dan DAU2002 & BHSDA memiliki koefisien variasi masing-masing 59.641% dan 59.771%. Terjadi penurunan disparitas antar daerah dengan adanya kombinasi kedua transfer di atas. Daerah-daerah yang memperoleh dana bagi hasil yang besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil sehingga DAU dapat berperan sebagai faktor pemerata.

Kombinasi dari seluruh dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil (PBB BPHTB, PPh, BHSDA) memperburuk disparitas antar daerah, nilai variasinya 60.059%. Nilai variasi ini paling besar dari seluruh kombinasi kebijakan. Hal ini dapat dimengerti karena karena SDA seperti Migas, kehutanan, pertambangan, dan barang tambang lainnya tersebar tidak merata. Daerah seperti Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kaltim, Kalteng, Maluku, Irian Jaya memperoleh dana BHSDA yang sangat signifikan baik secara absolut maupun relatif terhadap PDRBnya. Sedangkan bagi hasil PPh dan PBB BPHTB hanya menguntungkan daerah-daerah kota besar seperti DKI, Riau dan Kaltim.

Jika DAU dimasukkan dalam model bersama dengan kebijakan bagi hasil (PBB BPHTB, PPh & BHSDA) maka nilai koefisien variasinya akan turun walaupun tidak signifikan yaitu 59.793%. Nilai koefisien ini berada sedikit diatas nilai simulasi historis yang besarnya 59.790%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya otonomi daerah atau kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi disparitas antar daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Permasalahan ketimpangan dalam satu wilayah tidak kalah pentingnya dengan ketimpangan Jawa Luar-Jawa dan antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. Permasalahan ketimpangan dalam satu wilayah perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat, karena memberikan dampak buruk terhadap kondisi sosial ekonomi. Daerah-daerah yang memiliki PDRB per-Kapita tinggi seperti DKI, Riau dan Kaltim akan mendorong masyarakat disekitar wilayah ini bermigrasi menuju daerah yang pendapatannya tinggi. Arus migrasi yang cukup besar selain akan memberikan masalah tersendiri bagi daerah tujuan seperti penyediaan barang publik, masalah

kriminalitas juga memberikan masalah bagi daerah yang ditinggalkan karena akan kehilangan tenaga kerja potensial.

Tabel. 4.a
Hasil Simulasi Pendapatan Perkapita (PDRBcap) dalam Juta/orang.

No.	PROPINSI	SDO	PBB	PPH	BHSDA	DAU 2002
		INPRES	BPHTB			
		<i>(Historis)</i>				
1	DI Aceh	1.907	1.849	1.843	1.916	1.988
2	Sumut	1.641	1.612	1.608	1.608	1.698
3	Sumbar	1.54	1.497	1.494	1.495	1.63
4	Riau	4.283	4.263	4.254	4.484	4.371
5	Jambi	1.988	1.949	1.943	1.95	2.098
6	Sumsel	1.94	1.911	1.908	1.932	1.981
7	Bengkulu	1.585	1.537	1.534	1.535	1.688
8	Lampung	1.131	1.105	1.103	1.11	1.181
9	DKI	6.213	6.197	6.21	6.172	6.184
10	Jabar	1.484	1.46	1.458	1.458	1.511
11	Jateng	1.378	1.355	1.353	1.352	1.426
12	DIY	1.626	1.593	1.591	1.589	1.712
13	Jatim	1.663	1.641	1.638	1.638	1.708
14	Bali	2.097	2.052	2.049	2.047	2.178
15	NTB	1.257	1.218	1.218	1.22	1.318
16	NTT	1.179	1.142	1.139	1.139	1.309
17	Kalbar	1.559	1.52	1.516	1.518	1.642
18	Kalteng	2.263	2.198	2.187	2.213	2.375
19	Kalsel	1.704	1.654	1.648	1.665	1.777
20	Kaltim	5.398	5.354	5.34	5.742	5.503
21	Sulut	1.396	1.321	1.32	1.319	1.504
22	Sulteng	1.154	1.108	1.105	1.107	1.276
23	Sulsel	1.583	1.548	1.545	1.546	1.666
24	Sultra	1.529	1.469	1.466	1.468	1.652
25	Maluku	1.295	1.212	1.207	1.21	1.419
26	Irja	3.085	3.012	2.992	3.023	3.381
27	Maluku Utara	2.46	2.416	2.411	2.423	2.639
28	Banten	1.275	1.263	1.26	1.258	1.298
29	Ba-Bel	1.902	1.864	1.859	1.864	1.997
30	Gorontalo	1.326	1.284	1.282	1.283	1.398
RATA-RATA		2.028	1.987	1.983	2.009	2.117
STDEV		1.212	1.215	1.215	1.265	1.211
AX		6.213	6.197	6.21	6.172	6.184
		Jakarta	Jakarta	Jakarta	Jakarta	Jakarta
MIN		1.131	1.105	1.103	1.107	1.181
		Lampung	Lampung	Lampung	Sulteng	Lampung
Koef. Variasi		59.77	61.16	61.27	62.98	57.21

Tabel. 4.a
Hasil Simulasi Pendapatan Perkapita (PDRBcap) dalam Juta/orang, continued

No.	PROPINSI	PBB	PPh	PPh	BHSDA	PPB	DAU/2002
		BPHTB PPh	BHSDA	DAU 2002	DAU 2002	BPHTB PPh BHSDA	PPh PBB BPHTB BHSDA
1	DIACch	1.849	1.917	1.989	2.062	1.924	2.07
2	Sumut	1.614	1.61	1.7	1.7	1.615	1.707
3	Sumbar	1.498	1.496	1.631	1.632	1.5	1.637
4	Riau	4.27	4.491	4.378	4.608	4.508	4.633
5	Jambi	1.95	1.951	2.099	2.107	1.959	2.116
6	Sumsel	1.913	1.934	1.982	2.007	1.939	2.013
7	Bengkulu	1.538	1.536	1.689	1.69	1.54	1.695
8	Lampung	1.106	1.111	1.181	1.189	1.114	1.192
9	DKI	6.237	6.212	6.225	6.187	6.24	6.255
10	Jabar	1.461	1.46	1.512	1.513	1.463	1.517
11	Jateng	1.356	1.353	1.427	1.427	1.356	1.43
12	DIY	1.595	1.591	1.713	1.712	1.595	1.718
13	Jatim	1.642	1.639	1.71	1.71	1.643	1.715
14	Bali	2.055	2.049	2.181	2.178	2.056	2.187
15	NTB	1.22	1.222	1.32	1.323	1.224	1.327
16	NTT	1.142	1.14	1.309	1.309	1.143	1.313
17	Kalbar	1.521	1.519	1.643	1.645	1.523	1.65
18	Kalteng	2.199	2.214	2.376	2.403	2.227	2.417
19	Kalsel	1.656	1.667	1.78	1.797	1.675	1.807
20	Kaltim	5.364	5.752	5.513	5.915	5.776	5.949
21	Sulut	1.323	1.322	1.507	1.507	1.326	1.513
22	Sulteng	1.109	1.108	1.277	1.279	1.112	1.283
23	Sulse	1.549	1.547	1.667	1.668	1.552	1.674
24	Sultra	1.47	1.468	1.652	1.654	1.472	1.658
25	Maluku	1.212	1.21	1.419	1.422	1.216	1.429
26	Irja	3.017	3.028	3.386	3.417	3.053	3.447
27	Maluku Utara	2.417	2.424	2.64	2.652	2.43	2.658
28	Banten	1.265	1.26	1.301	1.299	1.265	1.306
29	Bangka Belitung	1.866	1.866	1.999	2.004	1.873	2.013
30	Gorontalo	1.284	1.283	1.398	1.399	1.285	1.402
	RATA- RATA	1.99	2.013	2.12	2.147	2.02	2.158
	STDEV	1.221	1.271	1.217	1.268	1.278	1.28
	MAX	6.237	6.212	6.225	6.187	6.24	6.255
		Jakarta	Jakarta	Jakarta	Jakarta	Jakarta	Jakarta
	MIN	1.106	1.108	1.181	1.189	1.112	1.192
		Lampung	Sulteng	Lampung	Lampung	Sulteng	Lampung
	Koef. Variasi	61.36	63.16	57.4	59.07	63.24	59.34

Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (otonomi daerah) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena selama ini pembiayaan dan penentuan suatu kebijakan atas dana yang ada di daerah ditentukan oleh pusat. Adanya otonomi daerah yang disertai dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemberian kewenangan yang lebih luas, diharapkan daerah mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan daerah dapat didekati dengan melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan per-kapita untuk masing-masing simulasi. Pertumbuhan dihitung dari kondisi historis (sebelum adanya desentralisasi fiskal).

Tabel 5 Ringkasan Hasil Simulasi Pertumbuhan PDRB per-Kapita

No.	Simulasi	Rata-Rata	Standar	Koeffisien	Growth	Daerah	Growth	Daerah
		%	Deviasi	Variasi	Tertinggi	Tertinggi	Terendah	Terendah
		%	%	%	%		%	
1	PBB BPHTB	-0.215	0.095	-44.335	-0.033	DKI	-0.406	Maluku
2	PPh	-0.230	0.099	-43.118	-0.016	DKI	-0.426	Maluku
3	BHSDA	-0.175	0.179	-102.036	0.441	Kaltim	-0.414	Maluku
4	DAU2002	0.316	0.181	57.213	0.741	NTT	-0.048	DKI
5	PBB BPHTB & PPh	-0.207	0.100	-48.345	0.017	DKI	-0.404	Maluku
6	PPh & BHSDA	-0.167	0.181	-108.832	0.455	Kaltim	-0.412	Maluku
7	PPh & DAU2002	0.324	0.177	54.552	0.744	NTT	0.002	DKI
8	BHSDA & DAU2002	0.380	0.192	50.479	0.745	NTT	-0.045	DKI
9	PBB BPHTB & PPh & BHSDA	-0.143	0.184	-128.391	0.487	Kaltim	-0.390	Maluku
10	PBB BPHTB & PPh & BHSDA & DAU2002	0.411	0.192	46.692	0.817	Irja	0.039	DKI

Sumber: Hasil simulasi

Kebijakan bagi hasil pajak (PBB BPHTB, PPh) dan bagi hasil sumber daya alam (BHSDA) secara nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Transfer BHSDA, PPh, PBB BPHTB memberikan pertumbuhan -0.175%, -0.230% dan -0.215% (transfer SDO Inpres digantikan dengan ketiga transfer diatas). Transfer PPh dan PBB BPHTB hanya menguntungkan DKI Jakarta walaupun pertumbuhannya negatif. DKI adalah daerah memperoleh bagi hasil PBB BPHTB dan PPh terbesar baik secara absolut maupun relatif terhadap PDRBnya. DKI memperoleh PBB BPHTB sebesar 976.32 miliar (269.863 miliar nilai konstan 1993=100) dan 0.472% dari total PDRB. Sedangkan bagi hasil PPh sebesar 1446.96 miliar (399.951 miliar nilai konstan 1993=100) atau 0.699% dari total PDRB tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi negatif disebabkan tidak ada satupun daerah memperoleh bagi hasil dari pajak maupun sumber daya alam yang besarnya sama dengan SDO Inpres.

Transfer BHSDA memberikan pertumbuhan positif pada Kaltim 0.441%, dan Riau 0.324%. Kaltim memperoleh bagi hasil SDA 9 kali dari SDO Inpres dan Riau memperoleh 8 kali dari SDO Inpres. Sedangkan Aceh sebagai daerah penerima BHSDA terbesar ketiga memiliki pertumbuhan ekonomi -0.025%. Sedangkan Irian Jaya tidak begitu terpengaruh dengan adanya transfer ini. Transfer BHSDA mengakibatkan variasi pertumbuhan antar daerah sangat tinggi yaitu -102.036% hampir 2.5 kali dari variasi pertumbuhan yang diakibatkan oleh PBB BPHTB dan PPh. Kondisi ini disebabkan karena

daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang besar mampu melakukan investasi sarana dan prasarana sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Transfer DAU secara nasional menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 0.316%. Daerah yang paling diuntungkan dengan transfer ini adalah NTT, Sulteng, Irian Jaya, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan propinsi ini berturut-turut 0.741%, 0.705%, 0.657%, 0.498% dan 0.530%. NTT menerima DAU sebesar 2349.94 miliar (649.544 miliar nilai konstan 1999=100) atau 22.918%. NTT secara relatif merupakan daerah yang paling besar menerima DAU, hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di daerah ini dan adanya banyak pengungsi dari Timtim. Sulteng dan Maluku Utara menerima DAU besar karena berkaitan dengan adanya kerusuhan/konflik di daerah ini sehingga diperlukan dana yang besar untuk membangun kembali daerah ini. Irian Jaya menerima DAU dalam jumlah besar disebabkan kondisi geografis, kemiskinan, luas wilayah Irian Jaya. Satu-satunya daerah yang negatif pertumbuhan ekonomi akibat transfer DAU adalah Jakarta. Daerah ini menerima DAU 0.259% dari total PDRBnya.

Kombinasi kebijakan yaitu PBB BPHTB & PPh, PPh & BHSDA dan PBB BPHTB & PPh & BHSDA tidak menghasilkan rata-rata pertumbuhan yang positif. Satu-satunya daerah yang memiliki pertumbuhan positif akibat dari transfer PBB BPHTB & PPh adalah Jakarta (0.017%). DKI memperoleh dana bagi hasil PBBBPHTB dan PPh sebesar 2,5 kali dari SDO Inpres. Transfer PPh & BSDA berpengaruh positif terhadap Kaltim dan Riau. Sedangkan transfer dana bagi hasil (PBB BPHTB & PPh & BHSDA) berpengaruh positif terhadap DKI, Aceh, Riau dan Kaltim. Transfer total dana bagi hasil (baik pajak maupun SDA) mengakibatkan variasi pertumbuhan yang sangat besar yaitu -128.391%.

Kombinasi kebijakan PPh & DAU2002 dan BHSDA & DAU2002 menghasilkan pertumbuhan yang positif. Daerah yang paling tinggi pertumbuhan PDRB per kapita adalah NTT (0.744% dan 0.745%) dan terendah DKI (0.002% dan -0.045%). Kombinasi kebijakan PBB BPHTB & PPh & BHSDA & DAU2002 memberikan rata-rata pertumbuhan PDRB per-kapita yang paling tinggi (0.411%) dan variasi pertumbuhan PDRB per-kapita yang rendah. Daerah yang paling menikmati pertumbuhan tinggi adalah Irian Jaya (0.817%) dan yang paling rendah DKI (0.039%). Terlihat jelas bahwa DAU memiliki pengaruh yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari hasil simulasi terlihat bahwa dana bagi hasil baik dari pajak maupun SDA tidak efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB per-kapita. Kebijakan ini hanya menguntungkan sebagian kecil daerah di Indonesia seperti Kaltim, Riau, Aceh. Kebijakan ini juga mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah (horizontal) yang tinggi. Implementasi dari kebijakan BHSDA lebih didasari landasan politik dibandingkan dengan landasan ekonomis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah pusat untuk meredam gejolak politik di daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil simulasi di atas menunjukkan bahwa Aceh dan Irian Jaya tidak sensitif terhadap BHSDA tetapi lebih sensitif terhadap DAU, oleh karena itu pemberian bagi hasil SDA yang besar bagi kedua daerah ini tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah pusat sebaiknya memberikan DAU yang lebih besar kepada kedua daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sebagai pemerata pertumbuhan ekonomi antar daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan yang sangat besar pada pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi, kemandirian daerah belum terlihat dan ada kecenderungan sistem yang sentralistik masih berlangsung. Pemerintah pusat perlu membuat terobosan baru dalam kebijakan agar kemandirian daerah dapat terwujud.

Hasil simulasi diatas menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia walaupun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tetapi nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif kecil. Tidak ada satu daerah pun yang perekonomiannya tumbuh diatas 1% sebagai akibat desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa daerah di Jawa & Bali memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan daerah diluar Jawa & Bali. Terjadi transfer pertumbuhan dari Jawa ke-Luar Jawa, sehingga pada akhirnya daerah-daerah di Luar Jawa & Bali mampu mengejar ketertinggalannya terhadap wilayah Jawa & Bali.

Tabel.6 Hasil Simulasi Pertumbuhan Pendapatan Perkapita (PDRBcap)

No.	PROPINSI	PBB	PPH	BHSDA	DAU	PBB	PPh	PPh
		BPHTB			2002	BPHTB	BHSDA	DAU
		%	%	%	%	%	%	%
1	DI Aceh	-3.085	-3.388	0.446	4.233	-3.037	0.494	4.281
2	Sumut	-1.783	-2.008	-2.009	3.459	-1.674	-1.901	3.568
3	Sumbang	-2.83	-2.985	-2.949	5.821	-2.731	-2.85	5.92
4	Riau	-0.46	-0.673	4.698	2.06	-0.284	4.874	2.237
5	Jambi	-1.969	-2.288	-1.916	5.526	-1.905	-1.851	5.59
6	Sumsel	-1.502	-1.672	-0.411	2.085	-1.419	-0.328	2.169
7	Bengkulu	-3.03	-3.235	-3.16	6.49	-2.972	-3.101	6.549
8	Lampung	-2.322	-2.484	-1.837	4.365	-2.257	-1.772	4.429
9	DKI	-0.265	-0.051	-0.664	-0.464	0.391	-0.008	0.192
10	Jabar	-1.613	-1.739	-1.719	1.839	-1.524	-1.631	1.927

KESIMPULAN

Esensi dari UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesungguhnya adalah distribusi sumber daya keuangan (*financial sharing*) sebagai implikasi dari distribusi wewenang yang diatur dalam UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pelbagai tujuan pokoknya adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang didasarkan pada pembagian tugas kewenangan dan fungsi-fungsi. UU No.25/1999 juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan/disparitas antar daerah (*horizontal imbalance*) dan ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*).

Bagi Hasil PBB BPHTB dan Bagi Hasil PPh menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hanya daerah tertentu yang merupakan pusat industri dan jasa yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang negatif. Tetapi daerah kaya SDA seperti Kaltim dan Riau adalah daerah yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu kebijakan bagi hasil SDA memperburuk ketimpangan/disparitas antar daerah. Tidak ada alasan ekonomis yang mendasari kebijakan ini tetapi lebih didasari kebijakan politis, sehingga patut dipertanyakan kembali kebijakan ini.

Dana Alokasi Umum (DAU) selain sebagai faktor pemerata fiskal antar daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan DAU sangat efektif dalam mengurangi ketimpangan/disparitas antar daerah. Kombinasi pelbagai kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia (PBB BPHTB, PPh, BHSDA dan DAU) mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0.411% dari kondisi sebelum desentralisasi.

Dampak Kebijakan desentralisasi fiskal lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang tinggi di KTI dan berada diatas rata-rata nasional. Jawa & Bali merupakan daerah yang paling rendah pertumbuhannya dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Berarti tujuan dari desentralisasi untuk pemerataan Jawa dengan Luar Jawa dan antara KTI dan KBI dapat tercapai. Tetapi secara keseluruhan kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengurangi disparitas antar daerah.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam kerangka otonomi, kemandirian daerah belum terlihat dan ada kecenderungan sistem yang sentralistik masih berlangsung. Pemerintah pusat perlu membuat terobosan baru dalam kebijakan agar kemandirian daerah dapat terwujud.

Saran-saran

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan sebuah proyek besar dengan permasalahan yang sangat kompleks dan memiliki resiko yang besar. Jika desentralisasi ini berjalan sukses maka dapat dijadikan referensi negara lain tetapi jika tidak *dimanage* dengan baik dapat menjadi bumerang yaitu adanya disintegrasi bangsa. Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali pelbagai kebijakan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA karena tidak memberikan hasil yang optimal. Kedua kebijakan di atas selain memberikan pertumbuhan negatif, juga mengakibatkan disparitas antar daerah.

Kelemahan Studi

Studi ini memiliki kelemahan terutama masalah data. Data konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah pada tingkat kabupaten tidak ada publikasi dari BPS, sehingga data tersebut diproksi dengan menggunakan data-data lain. Kelemahan yang lain adalah model makro ini bersifat *closed economy*, keterkaitan antar daerah yang belum tercermin dalam model. Pada penelitian desentralisasi pada masa yang akan datang, penulis berharap dapat dibangun sebuah model yang bersifat *open economy* dan memasukkan unsur keterkaitan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Iwan Jaya. " *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia.* " Editor: Marsudi Djojodipuro. Jakarta:Lembaga Penerbit FE-UI, 1993.
- _____, " *Review On Regional Development in Indonesia: The concern of Equity And Foreign Exchange Accumulation.* " Jakarta: Inter-University Centre, Economics, Univesity of Indonesia (IUC-EC-UI), 1990.
- _____, " *Interregional Allocation Ofresources In Indonesia: Is There Any systematic Planning?* " Jakarta: Inter-University Centre, Economics, Univesity of Indonesia (IUC-EC-UI), 1990.
- Bahl, Roy and Barbara D. Miller editor. " *Local goverment Finance In The Third World : A case Study of the Philippines.* " New York: Praeger Publishers, 1983.
- BPS. " *PDRB Propinsi-Propinsi Di Indonesia Menurut Pengeluaran 1996-1999.* " Jakarta :BPS Pusat.
- _____, " *PDRB Kabupaten/Kotamadya di Indonesia 1996-1999.* " Jakarta: BPS Pusat.
- _____, " *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II 1996/1997,1997/1998,1998/1999, 1999/2000.* " Jakarta : BPS Pusat
- _____, " *Statistik Indonesia 1996,1997,1998,199.* " Jakarta : BPS Pusat
- _____, " *Propinsi Dalam Angka.* " Jakarta: BPS tiap-tiap Daerah.
- Brodjonegoro, Bambang P.S. " *The Impact of Fiscal Decentralization Processt The Indonesian Economies: A Simultaneous Econometric Approach.* " Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium 2001: Regional Economies in Transitions, June 14-16,2001.
- Dajan, Anto. " *Pengantar Metode Statistik Jilid I.* " Jakarta :LP3ES,1986.
- _____, " *Pengantar Metode Statistik Jilid II.* " Jakarta :LP3ES,1986.
- Davey,K.J. " *Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga.* " Jakarta: UI-Press, 1988.
- Devas,Nick et.al. " *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.* " Jakarta: UI-Press, 1989.
- Dornbusch, Rudigr and Stanley fischer. " *Macro-Economics .* " New York: McGraw-Hill,Inc., 1994.
- Fortc, Francesco and Alan Peacock editor. " *Public Expenditure and Government Growth.* " Oxford: Basil Balckwell Ltd, 1985.
- Gujarati, Damodar. *Basic Econometrics*, New York : Mc Graw Hill,1988.
- Isard, Walter. et. all. " *Methods of Interregional and Regional Analysis.* "England: Ashgate, 1998.
- Ikhsan, M et. all , ed. " *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru (80 tahun Mohamad Sadli)* " Jakarta : Kompas, 2002.
- IMF . " *Internasional Financial Statistic Year Books 2000.* " New York: IMF.
- Judge, George G. Et. All. " *Introduction to The Theory And Practice of Econometric.* " New York: John Wilcy & Sons, Inc, 1982.

- Jones, Charles I. "Introduction to Economic Growth." New York: W.W Norton & Company, Inc. 1998.
- LPEM FE-UI. "Dampak Penerimaan Dana Perimbangan Dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Bagi Perekonomian Daerah." Laporan Hasil Penelitian, 2001.
- Keraf, Gorys. "Komposisi". Flores : Nusa Indah, 1989.
- Mahi, Raksaka et al. "Persiapan Menuju Desentralisasi Dan Otonomi Daerah." LPEM Working Paper, Jakarta 2000.
- _____, "Fiscal Decentralizations: Its Impact on Cities Growth." Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.2, No.1, Juli 2001.
- Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics, fourth edition." New York: Worth Publishers, 2000.
- Pindyck, Robert S. And Daniel L Rubinfeld. "Econometric Models and Economic Forecast." New York: Irwin McGraw-Hill, 1998.
- _____, "Microeconomics." New Jersey : Prentice-Hall, Inc. 2001
- Richardson, Harry W. "Regional Economics." Illinois: University of Illinois Press. 1978.
- Scarth, William M. "Macroeconomics: An Introduction to advanced Methods." Toronto: Harcourt Brace Jovanovich Canada Inc., 1988.
- Sidik, Machfud. "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Mengacu Pada Tujuan Nasional". Jakarta : 17-18 April 2002 (seminar nasional). www.djpkpd.go.id
- _____, "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Aplikasi Teori dan Aplikasinya di Indonesia)". Yogyakarta : 13 Maret 2002 (seminar "Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia"). www.djpkpd.go.id
- UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. www.djpkpd.go.id
- UU No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. www.djpkpd.go.id
- UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Depkeu.
- _____, Data Alokasi Umum Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi 2002.